



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KARDIYONO
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 885178

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.160.000.000

1. Tanah Seluas 413 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
2. Tanah Seluas 415 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. Tanah Seluas 561 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. Tanah Seluas 546 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
6. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
7. Tanah Seluas 256 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 155.000.000

1. MOBIL, RUSH MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 50C (T135HC) M/T. / SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 73.558.139



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.388.558.139
III. HUTANG	Rp.	384.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.004.558.139

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LA ROKA
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 261556

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	222.250.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/96 m2 di KAB / KOTA KOTA AMBON , HASIL SENDIRI Rp. 222.250.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	7.500.000
1. MOTOR, Yamaha RX King Tahun 2004, HADIAH Rp. 7.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	14.900.000
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	53.936.034
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	298.586.034
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	298.586.034

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LA HARIMIN
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 495026

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	70.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 252 m ² /122.5 m ² di KAB / KOTA KOTA AMBON , HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	33.500.000
1. MOTOR, HONDA MEGA PRO 160.D Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000		
2. MOTOR, SUZUKI SATRIA FU 150 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000		
3. MOTOR, HONDA SCOPY SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	241.681.162
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	346.681.162
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	346.681.162

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.